LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I KECAMATAN LENGKONG TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Dokumen Laporan Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Akhir Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

Dalam rangka penyusunan Dokumen Laporan Hasil Perencanaan Daerah Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana amanat Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguann Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Demikian Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Perencanaan Daerah Sampai Dengan Akhir Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Nganjuk, 13 Maret 2025
CAMAT LENGKONG

WARDOYO S.IP.M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 197509071996021002

BAB I
PENDAHULUAN

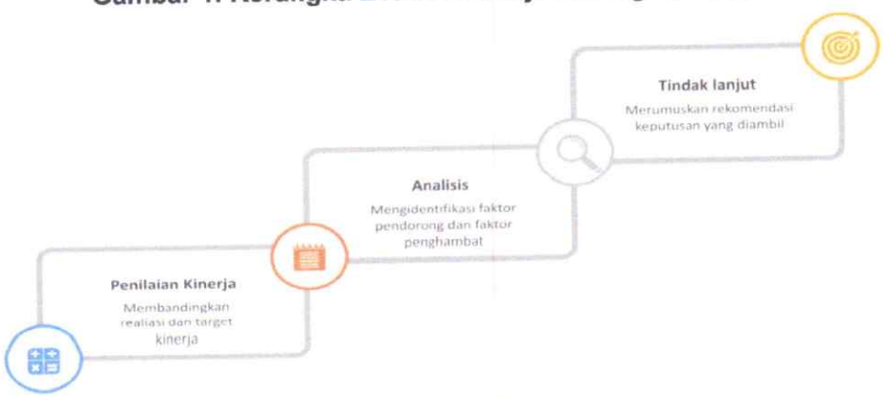
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sampai Triwulan I melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/263/K/411.013/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB I PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

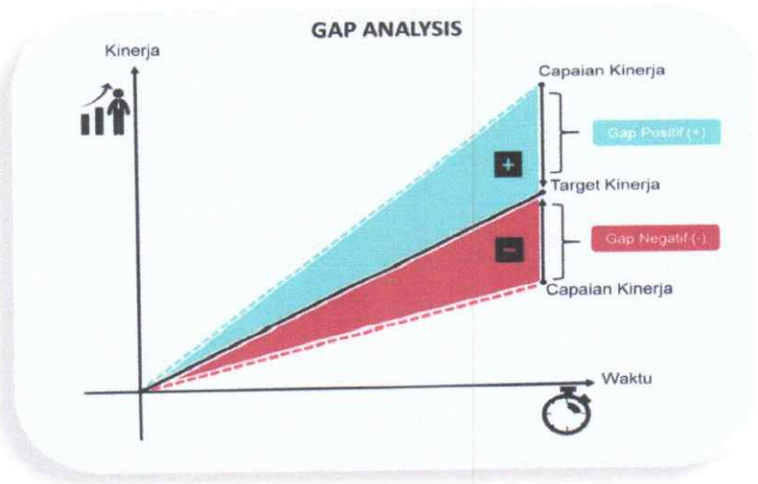
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif

5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Tujuan				
	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	76		
2.	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	80	93,94	100%
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	-Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayahan Kecamatan	90%		

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 enilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreatlitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

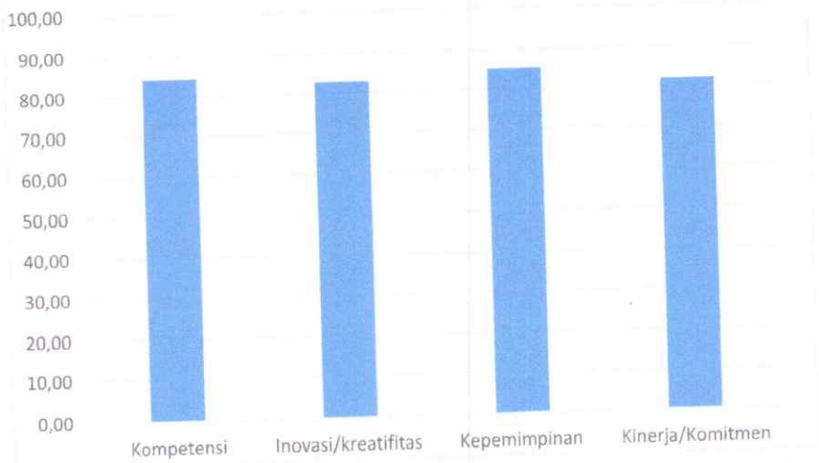
1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas

3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen

Hasil penilaian sinergitas kecamatan Lengkong adalah 64,68 dengan rincian komponen sebagai berikut :

Grafik 2.1

Hasil Penilaian Sinergitas Kecamatan Lengkong



Berdasarkan grafik diatas dalam pelaksanaan sinergitas kecamatan kinerja/komitmen belum optimal. Hal ini kurangnya sumberdaya manusia , adanya kekosongan jabatan 1 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kasubsi .

I.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Nilai Sakip Kecamatan**	**2.602.541.677**	**119.793.032**	*5%*
	Perencanaan, penganggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggar an, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**9.396.000**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1.788.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1.788.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1.164.000		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1.164.000		

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1.164.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1.164.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1.164.000		
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.882.628.138**	**101.349.136**	**5%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1.870.802.138	101.349.136	5%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1.164.000		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1.164.000		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	1.788.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1.494.000		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1.164.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	3.328.000		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1.724.000		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.940.000**		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	1.772.000		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	1.772.000		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	1.156.000		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang*	1.156.000		

	Milik Daerah pada	Milik Daerah pada SKPD			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.156.000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.156.000		
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.772.000		
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	**Prosentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**16.572.600**		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9.600.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.340.000		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.000.000		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.000.000		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.500.000		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.066.300		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.066.300		
	Administrasi Umum perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**149.573.239**	**2.375.000**	**2%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.672.100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41.869.200		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40.370.939	**2.375.000**	**6%**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3.375.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	6.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	46.686.000		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	7.600.000		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*			
	Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**137.569.000**		
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	95.569.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	42.000.000		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*			
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**136.980.000**	**9.288.896**	*7%*
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	2.400.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	24.000.000	688.896	*3%*
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	110.580.000	8.600.000	8%
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**259.882.700**	**6.780.000**	**3%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	50.763.000	2.980.000	**6%**
	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	7.500.000		
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	88.898.800	3.800.000	*4%*
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	112.720.900		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHA DAN	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan**	**63.760.700**	**4.575.000**	**7%**

	PELAYANAN PUBLIK	**dengan tertib**			
	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Prosentase Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**34.765.750**	**2.575.000**	**7%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	26.600.000	2.575.000	**10%**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	8.165.750		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**7.340.800**		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*	2.164.000		
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan*	2.588.400		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2.588.400		
	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	**Prosentase Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**6.088.400**		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	6.088.400		
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**15.565.750**	***2.000.000***	***13%***
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan*			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*15.565.750*	2.000.000	*13%*
	PROGRAM PEMBERDAYA AN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan**	**58.113.000**	**14.575.000**	**25%**

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**58.113.000**	**14.575.000**	**25%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Be artisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	41.781.500	14.575.000	*35%*
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	16.331.500		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	-		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan	**Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan dan Kelurahan**			
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat*			
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri*			
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah*			

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya*			
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup*			
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*			
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga*			
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**33.980.400**	**825.000**	2%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**33.980.400**	**825.000**	2%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	27.803.600	825.000	3%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*	6.176.800		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan				

	dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	*Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	6.000.000		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**66.198.700**	**3.575.000**	**5%**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**66.198.700**	**3.575.000**	**5%**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	6.221.000		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	12.592.000	825.000	**7%**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	6.442.000	2.750.000	**43%**
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan*	4.221.000		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	4.221.000		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	6.331.500		
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	4.221.000		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	3.221.000		
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan*			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	3.221.000		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	2.632.600		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka*	3.132.600		

	Pembangunan Partisipatif	*Perencanaan Pembangunan Partisipatif*			
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga*	2.610.500		
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa*			
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa*	2.110.500		
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	3.110.500		
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*	1.910.500		

Analisis capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025 Dari data diatas untuk capaian kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025 tinggi hal ini desebabkan adanya sinergitas yang tinggi antar stake holder terkait, Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dari data diatas realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 hal ini desebabkan adanya sinergitas yang tinggi antar stake holder terkait dan terlaksananya Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dari data diatas realisai keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025 tinggi.

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Tujuan		
	Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Lengkong	Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Lengkong	Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum Optimal.
2	Sasaran		
	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat.	Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat.
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Adanya peningkatan Aparat Desa bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat. 1.	Banyak Kegiatan yang belum dilaksanakan Terbatasnya Jumlah 1. SDM

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	**ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat.	1. Ada beberapa kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga tidak maksimal dalam realisasinya 2. Ada beberapa kegiatan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PPTK
	Perencanaan, penganggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Administrasi keuangan perangkat daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		

	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		
	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
	Administrasi Umum perangkat daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
	Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Mebel		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

2.	**PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA DAN PELAYANAN PUBLIK**	Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat.	1. Ada kegiatan kurang tepat dalam penganggaran, sehingga tidak maksimal dalam realisasinya Terbatasnya Jumlah SDM
	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
3.	**PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Forpincam berjalan cukup baik dan sinergis	Banyak Kegiatan yang belum dilaksanakan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di		

	Wilayah Kecamatan		
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	• Pola kerja di Kecamatan Lengkong yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif • Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman	Banyak Kegiatan yang belum dilaksanakan
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
5.	**PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	• Meningkatnya tertib administrasi desa dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu • Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang siap dan mampu menduduki jabatan melalui seleksi pengisian lowongan secara terbuka dan akuntabel sudah terisi semua	1. Banyak Kegiatan yang belum dilaksanakan Terbatasnya Jumlah SDM
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		

	Desa		
	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Nganjuk Tahun 2025 tentang Tata Cara Perenaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kami telah menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Triwulan I Tahun 2025 dengan kesimpulan capaian kinerja dan keuangan yang dengan kategori tinggi .

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Triwulan I Tahun 2025 juga sebagai bahan tindak lanjut kami dalam melakasanakan Rencana Kerja dan Anggaran di Triwulan berikutnya dengan memperhatihakan faktor pendorong dan hambatan Tujuan/Sasaran, Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah .

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk
Triwulan I Tahun 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada sasaran RKPD :
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Nilai Sakip Kecamatan
Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

KECAMATAN LENGKONG

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come)/Kegiatan (Out Put)/Sub Kegiatan (Out put)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi) RENJA (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yag dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025).		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungj awab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100		15
				K		K		K		K		K		K		K		K		K		K		
1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat**	**ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai Sakip Kecamatan**	**65**	**2.928.166.374**	**65**	**1.864.248.277**	**65**	**2.602.541.677**		**119.793.032**							**-**	**119.793.032**	**65**	**119.793.097,00**	**100**	**4%**	**Kecamatan Lengkong**
2		**Perencanaan, penganggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggar an, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**28**	**7.700.000**	**28**	**6.104.000**	**7**	**9.396.000**									**-**	**-**	**28**	**28,00**	**100**	**0%**	
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	1.100.000	3	1.520.000	1	1.788.000									-	-	3	3,00	100	0%	
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1.100.000	3	1.528.000	1	1.788.000									-	-	3	3,00	100	0%	
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	1.100.000	3	1.528.000	1	1.164.000									-	-	3	3,00	100	0%	
3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	1.100.000		-	1	1.164.000									-	-	-	-	-	0%	
3		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	1.100.000		-	1	1.164.000									-	-	-	-	-	0%	

3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	1.100.000		-	1	1.164.000									-	-	-	-	-	0%	
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1.100.000	3	1.528.000	1	1.164.000									-	-	3	3,00	100	0%	
2		**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**120**	**2.527.515.574**	**120**	**1.397.445.959**	**40**	**1.882.628.138**	**10**	**101.349.136**							10	**101.349.136**	**130**	**101.349.256,00**	**108**	**4%**	
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	2.519.815.574	48	1.394.476.959	16	1.870.802.138	16	101.349.136							16	**101.349.136**	64	**101.349.184,00**	133	4%	
3		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	1.100.000		-	1	1.164.000									-	-	-	-	-	0%	
3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	1.100.000		-	12	1.164.000									-	-	-	-	-	0%	
3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	1.100.000	12	1.528.000	4	1.788.000									-	-	12	12,00	100	0%	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	1.100.000		-	1	1.494.000									-	-	-	-	-	0%	
3		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	1.100.000		-	1	1.164.000									-	-	-	-	-	0%	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	1.100.000	3	1.441.000	4	3.328.000									-	-	3	3,00	100	0%	
3		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	1.100.000		-	1	1.724.000									-	-	-	-	-	0%	

2		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**75**	**7.700.000**	**75**	***10.672.000***	**25**	9.940.000									-	-	**75**	**75,00**	**100**	**0%**	
3		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	1.100.000	3	1.528.000	1	1.772.000									-	-	**3**	**3,00**	100	0%	
3		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	1.100.000	3	1.528.000	1	1.772.000									-	-	**3**	**3,00**	100	0%	
3		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6	1.100.000	6	1.520.000	2	1.156.000									-	-	**6**	**6,00**	100	0%	
3		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	1.100.000	12	1.528.000	4	1.156.000									-	-	**12**	**12,00**	100	0%	
3		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	1.100.000	12	1.520.000	12	1.156.000									-	-	**12**	**12,00**	100	0%	
3		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	1.100.000	36	1.520.000	12	1.156.000									-	-	**36**	**36,00**	100	0%	
3		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3	1.100.000	3	1.528.000	1	1.772.000									-	-	**3**	**3,00**	100	0%	
2		**Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**Prosentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah**	**225**	**25.300.000**	**225**	**3.134.000**	**75**	**16.572.600**									-	-	**225**	**225,00**	**100**	**0%**	
3		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3	2.000.000		-	1	9600000									-	-	-	-	-	0%	
3		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48	14.000.000	48	1.528.000	16	-									-	-	**48**	**48,00**	100	0%	
3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	1.100.000		-	4	1.340.000									-	-	-	-	-	0%	
3		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	36	1.100.000		-	12	1.000.000									-	-	-	-	-	0%	

3		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	1.100.000		-	4	1.000.000									-	-	-	-	-	0%	
3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	1.200.000	18	1.606.000	6 Orang	1.500.000									-	-	18	18,00	100	0%	
3		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48	2.400.000		-	16 Orang	1.066.300									-	-	-	-	-	0%	
3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48	2.400.000		-	16 Orang	1.066.300									-	-	-	-	-	0%	
2		**Administrasi Umum perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**240**	**92.784.600**	**240**	**93.685.143**	**80**	**149.573.239**	**1**	**2.375.000**							**1**	**2.375.000**	**241**	**2.375.240,00**	**100**	**3%**	
3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	3.599.800	15	3.656.900	5	3.672.100									-	-	15	15,00	100	0%	
3		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	1.600.000	6	3.800.000	2	41.869.200									-	-	6	6,00	100	0%	
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	1.600.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	54.000.200	15	57.240.450	5	40.370.939	1	2.375.000							**1**	**2.375.000**	16	**2.375.015,00**	107	4%	
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	4.600.000	6	2.920.150	2	3.375.000									-	-	6	6,00	100	0%	
3		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	1.200.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	2.500.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	4.600.000	36	4.592.000	12	6.000.000									-	-	36	36,00	100	0%	

3		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	16.610.000	36	19.332.043	12	46.686.000									-	-	36	36,00	100	0%	
3		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	1.274.600	36	2.143.600	12	7.600.000									-	-	36	36,00	100	0%	
3		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	1.200.000													-	-	-	-	-	0%	
2		**Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**12**	**39.000.000**	**12**	**98.449.000**	**4**	**137.569.000**									-	-	**12**	**12,00**	**100**	**0%**	
3		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	15.000.000	3	24.750.000	4	95.569.000									-	-	3	3,00	100	0%	
3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	20.000.000	6	73.699.000	3	42.000.000									-	-	6	6,00	100	0%	
3		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3	4.000.000													-	-	-	-	-	0%	
2		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**144**	**63.300.000**	**144**	**48.984.248**	**48**	**136.980.000**	**2**	**9.288.896**							**2**	**9.288.896**	**146**	**9.289.040,00**	**101**	**15%**	
3		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	2.400.000	36	2.300.000	12	2.400.000									-	-	36	36,00	100	0%	
3		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	39.400.000	36	10.684.248	12	24.000.000	1	688.896							1	688.896	37	688.932,00	103	2%	
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	1.500.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	20.000.000	12	36.000.000	12	110.580.000	1	8.600.000							1	8.600.000	13	8.600.012,00	108	43%	
2		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**120**	**164.866.200**	**120**	**205.773.927**	**40**	**259.882.700**	**2**	**6.780.000**							**2**	**6.780.000**	**122**	**6.780.120,00**	**102**	**4%**	

3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	62.384.000	4	50.786.294	4	50.763.000	1	2.980.000							1	2.980.000	5	2.980.004,00	125	5%	
3		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60	6.400.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	7.000.000	30	6.935.000	10	7.500.000									-	-	30	30,00	100	0%	
3		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12	1.500.000	12												-	-	12	12,00	100	0%	
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	63.582.200	3	139.600.033	1	88.898.800	1	3.800.000							1	3.800.000	4	3.800.003,00	133	6%	
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	24.000.000	2	8.452.600	2	112.720.900									-	-	2	2,00	100	0%	
1		**PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**100%**	**52.256.000**	**100%**	**52.554.500**	**100%**	**63.760.700**	**7%**	**4.575.000**							**0**	**4.575.000**	**1**	**4.575.001,00**	**107**	**9%**	
2		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**39**	**26.092.000**	**39**	**31.068.500**	**13**	**34.765.750**	**1**	**2.575.000**							**1**	**2.575.000**	**40**	**2.575.039,00**	**103**	**10%**	
3		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36	24.992.000	36	28.518.500	12	26.600.000	1	2.575.000							1	2.575.000	37	2.575.036,00	103	10%	
3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	1.100.000	3	2.550.000	1	8.165.750									-	-	3	3,00	100	0%	
2		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**75**	**3.300.000**	**75**	**4.903.000**	**25**	**7.340.800**									-	-	75	75,00	**100**	**0%**	

3		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3	1.100.000	3	1.528.000	1	2.164.000									-	-	3	3,00	100	0%	
3		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	36	1.100.000	36	1.800.000	1	2.588.400									-	-	36	36,00	100	0%	
3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	1.100.000	36	1.575.000	2	2.588.400									-	-	36	36,00	100	0%	
2		**Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti**	**6**	**1.842.000**	**6**	**4.950.000**	**2**	**6.088.400**									-	-	**6**	**6,00**	**100**	**0%**	
3		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6	1.842.000	6	4.950.000	2	6.088.400									-	-	**6**	**6,00**	100	0%	
2		**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**75**	**21.022.000**	**75**	**11.633.000**	**25**	**15.565.750**	**1**	**2.000.000**							**1**	**2.000.000**	**76**	**2.000.075,00**	**101**	**10%**	
3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3	1.500.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36	19.522.000	36	**11.633.000**	12	15.565.750	1	2.000.000							1	**2.000.000**	**37**	**2.000.036,00**	103	10%	
1		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**100%**	**78.592.000**	**100%**	**213.503.100**	**100%**	**58.113.800**	**25%**	**14.575.000**							**0**	**14.575.000**	**1**	**14.575.001,00**	**125**	**19%**	
2		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**54**	**73.592.000**	**54**	**213.503.100**	**18**	**58.113.800**	**4**	**14.575.000**							**4**	**14.575.000**	**58**	**14.575.054,00**	**107**	**20%**	

3		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Be artisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	34.292.000	15	37.410.500	5	41.781.500	2	14.575.000							2	14.575.000	17	14.575.015,00	1.13	43%	
3		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	36	38.100.000	36	77.420.600	12	16.331.500									-	-	36	36,00	1.00	0%	
3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	1.200.000	3	98.672.000	12	-									-	-	3	3,00	1.00	0%	
2		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	***360***	**60.000.000**													-	-	-	-	-	**0%**	
3		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	

3		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	

1		**PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**100%**	**26.728.300**	**100%**	**83.362.500**	**100%**	**33.980.400**	**2%**	**825.000**							**0**	**825.000**	**1**	**825.001,00**	**100**	**3%**	
2		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**72**	**21.728.300**	**72**	**83.362.500**	**24**	**33.980.400**	**1**	**825.000**							**1**	**825.000**	**73**	**825.072,00**	**101**	**4%**	
3		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	16.728.300	12	77.990.000	12	27.803.600	1	825.000							**1**	**825.000**	**13**	**825.012,00**	108	5%	
3		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	36	5.000.000	36	5.372.500	12	6.176.800									-	-	**36**	**36,00**	100	0%	
2		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	36	**5.000.000**													-	-	-	-	-	0%	
3		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
1		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**100%**	**59.742.000**	**100%**	**14.785.000**	**100%**	**10.500.000**									-	-	**1**	**1,00**	**100**	**0%**	
2		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	**24**	**59.742.000**	**24**	**14.785.000**	**8 Lembaga Masyarakat**	**10.500.000**									-	-	**24**	**24,00**	**100**	**0%**	

3		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	270	4.742.000	270	14.785.000	45 Orang	4.500.000									-	-	270	270,00	1.00	0%	
3		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	270	10.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	270	10.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32	10.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	18	10.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6	5.000.000													-	-	-	-	-	0%	
3		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	5.000.000			1	6.000.000									-	-	-	-	-	0%	

3		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3	2.000.000														-	-	-	-	-	0%	
3		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	2.000.000	3	1.125.000	1	3.221.000										-	-	3	3,00	100	0%	
3		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3	2.000.000	3	-	1	2.632.600										-	-	3	3,00	100	0%	
3		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3	4.000.000	3	2.700.000	12	3.132.600										-	-	3	3,00	100	0%	
3		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	3	2.000.000	3	-	1	2.610.500										-	-	3	3,00	100	0%	
3		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3	2.000.000	3													-	-	3	3,00	100	0%	
3		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	2.000.000	3	1.125.000	1	2.110.500										-	-	3	3,00	100	0%	
3		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	36	2.000.000	36	3.600.000	1	3.110.500										-	-	36	36,00	100	0%	
3		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	36	4.000.000	36	-	1	1.910.500										-	-	36	36,00	100	0%	
																						Rata-rata capaian kinerja		66	148	
																						Predikat		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	

Nganjuk, 13 Maret 2025
CAMAT LENGKONG

WARDOYO S.IP.M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 197509071996021002